

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
DI KELURAHAN TLOGOSARI KULON, KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG**

Oleh:

Reza Agung Santosa, Dra. Dewi Rostyaningsih, MSi

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

JUDUL : **Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang**
NAMA : **Reza Agung Santosa**
NIM : **14020110120041**
JURUSAN : **Administrasi Publik**

Kebutuhan akan ruang terbuka hijau khususnya bagi publik di Kota Semarang sangatlah penting. Kondisi ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang 2012 baru mencapai 7,5% dari luas wilayah Kota Semarang, padahal sesuai amanat Undang-Undang setiap kota minimal harus mempunyai ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Berdasarkan uraian, penelitian ini membahas tentang Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kelurahan Tlogosari Kulon di lapangan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan RTH publik di Kelurahan Tlogosari Kulon ditemukan beberapa faktor yang menghambat proses Implementasi RTH publik yaitu belum tercapainya 20% luas RTH publik, kompetensi sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait, komunikasi antar organisasi yang belum efisien dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan RTH publik. Disarankan Kelurahan Tlogosari Kulon untuk mencapai target 20% luas RTH publik, memberi pelatihan tentang pelaksanaan penataan RTH publik, membuat aturan koordinasi yang fleksibel dan memberi informasi tentang RTH kepada masyarakat dan membuat kegiatan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan RTH publik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan RTH Publik, Komunikasi, Sumberdaya

ABSTRACT

Title : *Implementation of Public Open Green Space Planning Policy in West Tlogosari, Distric Pedurungan, Semarang City*
Name : *Reza Agung Santosa*
NIM : *14020110120041*
Department : *Public Adminstration*

However, Public Open Green Space in Semarang City iss only 7.5% the law stipulates that Act every city must have a minimum 20% Open Green Space. This study describe about how the regulation of Open Green Space Planning in Semarang City is, Number 7 Year 2010 about Open Green Space Planning. The purpose of this study is to see how the Implementation of Open Green Space Planning in West Tlogosari is and What are the factors that influence the implementation of open green space of public in Semarang city. This Research is *Qualitative Descriptive*. Based on the result of the study shows that the implementation of open green space planning in Semarang City consist of planning, utilizing and controlling. There are founded the obstacle factor of open green space planning in West Tlogosari, that are not achieving the 20% of Public Green Space, the high price of land, the competence of human resources, uneficient communication interagency, and awarness of society about the needs of public open green space. Semarang Municipal Goverment is suggested to achieve 'short-term- target of 20% public Open Green Space area, negotiate the price of land with societies, provide training about the implementation of Open Green Space Planning, make the flexible coordination rules, and give information about the Open Green Space to the societies and create an activities to get participation of societies in Implementing of Open Green Space Planning in West Tlogosari, Distric Pedurungan, Semarang City.

KEYWORDS: *REGULATION, IMPLEMENTATION, OPEN GREEN SPACE PLANNING, COMMUNICATION, HUMAN RESOURCE*

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang ada dengan total luas taman 16,83 (Ha) yang berarti hanya ada 6% RTH yang ada di Kelurahan Tlogosari Kulon dari luas wilayah sebesar 280,5 (Ha) RTH di Kelurahan Tlogosari Kulon masih kecil atau jauh dari RTH minimal yang seharusnya mempunyai luas RTH sebesar 56,1 (Ha) 20% dari luas wilayah (Analisis Peneliti Berdasarkan Data Tahun 2014 Dari Kelurahan Tlogosari Kulon) hal ini dikarenakan kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon yang berada di wilayah kota dan pesatnya pembangunan seperti toko, PKL, dan lain sebagainya, ditambah kawasan yang selalu tergenangi banjir ketika musim penghujan tiba mengindikasikan bahwa adanya penurunan fungsi dan manfaat RTH Publik itu sendiri.

Dengan adanya 20 (duapuluh) taman yang ada di Kelurahan Tlogosari Kulon, maka diharapkan bisa memperbaiki atau mengatasi masalah RTH Publik di kawasan Tlogosari Kulon dengan melihat dari pemanfaatan dan fungsi RTH publik itu sendiri. Taman tersebut merupakan sumber daya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang agar implementasi program RTH Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon berjalan dengan baik. Sehingga nantinya implementasi Program Penataan RTH Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon bisa optimal.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dengan melihat proses pemanfaatannya di Kelurahan Tlogosari Kulon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau yang dilihat dari proses pemanfaatannya di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
Memperkaya khasanah dalam mengembangkan teori - teori sosial terutama yang berkenaan dengan implementasi kebijakan publik serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang topik masalah yang menjadi pusat kajian penelitian.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis
Dalam penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
 - b. Bagi Instansi Terkait
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan dalam menghadapi kendala dan memecahkan masalah yang dihadapi berhubungan dengan Implementasi Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik, serta mengukur seberapa jauh dampak dari adanya Implementasi Perda No 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Tlogosari Kulon.
 - c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Implementasi Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di lingkungan mereka, agar masyarakat dapat memahami dan ikut berperan aktif.

1.5.3. Implementasi Kebijakan Publik

Peneliti mengambil model implementasi kebijakan menurut Edward George III yang menjelaskan adanya empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Karena menurut peneliti empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat suatu implementasi kebijakan. Maka pendekatan yang ideal adalah merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut.

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Kecenderungan – kecenderungan
4. Struktur birokrasi

1.6. Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan publik adalah upaya penerjemahan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah menjadi sebuah program atau kegiatan yang nyata, dimana dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Melalui Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 yang lebih fokus lagi di proses pemanfaatan RTH Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan berbagai pihak baik dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Tiogosari Kulon serta masyarakat.

Aspek-aspek yang menjadi fenomena penelitian terkait dengan Implementasi Penataan Ruang Terbuka

Hijau di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang adalah:

- 1. Ketercukupan ruang terbuka hijau (RTH).**
- 2. Kesesuaian fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau (RTH).**

Fungsi utama (intrinsik) atau fungsi ekologis:

- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
- sebagai peneduh
- produsen oksigen
- penyerap air hujan
- penyedia habitat satwa
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta
- penahan angin

Fungsi tambahan (ekstrinsik):

1. Fungsi sosial dan budaya:
 - menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - merupakan media komunikasi warga
 - tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam
2. Fungsi ekonomi:
 - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur
 - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain
3. Fungsi estetika:
 - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan
 - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga
 - pembentuk faktor keindahan arsitektural
 - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area

terbangun dan tidak terbangun.

1.6.1 Faktor-faktor pendorong dan penghambat tentang implementasi ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang.

1. Komunikasi
 - Transformasi informasi (*Transmisi*)
 - Kejelasan informasi (*Clarity*)
 - Konsistensi informasi (*Consistency*)
2. Sumberdaya
 - Sumberdaya manusia (*staff*)
 - Anggaran (*budgetary*)
 - Fasilitas (*facility*)
3. Kecenderungan – kecenderungan
 - Kejujuran
 - Komitmen
 - Sikap
4. Struktur birokrasi
 - Mekanisme
 - Struktur

1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta fenomena- fenomena menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

1.7.1. Desain Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian Eksploratif dan Deskriptif. Hal ini juga dinyatakan Masri Singarimbun (Singarimbun, 1989:4) dalam bukunya yang menyatakan dua jenis penelitian tersebut, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala dan menetapkan pengaruh antar gejala-gejala yang ditemukan.

2. Penelitian Eksploratif

Studi penelitian yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu, dengan maksud untuk merumuskan masalah- masalah secara terperinci.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah yang diambil adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dan lingkungan Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dipilih menjadi lokus atau wilayah penelitian karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang dipilih menjadi lokasi penelitian karena kurangnya ketersediaan akan ruang terbuka hijau publik, ketidak seimbangan ekologis, dan semakin tidak diperhatikannya fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau itu sendiri.

1.7.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposif (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2008:218-219) , Teknik Purposif yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Fuad dan Nugroho, 2014 : 58).

Adapun informan dalam penelitian ini yang diambil berdasarkan teknik purposif yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang,

Sekretaris, pegawai sub bidang pertamanan. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik snowball yaitu melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang nantinya akan mengarahkan penulis untuk mencari informan lain yang berkaitan dengan penelitian, tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang dicari oleh peneliti yang belum terjawab oleh informan kunci.

1.7.4. Sumber Data

Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2010:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kata-Kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Peneliti dalam melakukan penelitian ini tentunya harus melihat kondisi dari Kelurahan Tlogosari Kulon khususnya dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau.

2. Sumber Tertulis

Menurut Moleong (2010:159), dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis yaitu berupa buku, internet dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dan bisa juga dari Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon.

3. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif (Moleong, 2010:160). Foto yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa foto yang dihasilkan oleh orang lain dan yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data mempunyai manfaat yang besar.

4. Data Statistik

Penelitian kualitatif sering menggunakan data statistik yang digunakan untuk sumber data tambahan. Data statistik dapat membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian (Moleong, 2010:162). Pemanfaatan data statistik hanya sebagai cara untuk mengantarkan dan mengarahkan pada kejadian atau peristiwa yang ditemukan atau dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitian.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini antara lain adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Penulis menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2009:140).

2. Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan tipe Observasi Non-Partisipan (*Non-Participant Observation*). Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tahap tingkat makna. Pada pengumpulan data observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, perda, laporan-laporan, dokumen-dokumen yang ada serta menggunakan internet.

1.7.6. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman.

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan

dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan deskriptif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan lebih mempermudah peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya serta mencari bila diperlukan. Dengan melakukan reduksi data, maka peneliti akan merangkum dan mengambil data pokok yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, kecil dan angka.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian ini pun penulis mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Selain dengan menggunakan teks naratif, penulis juga menggunakan grafik, gambar atau tabel-tabel untuk menyajikan data. Dengan melakukan penyajian data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman mengenai apa yang terjadi.

4. Kesimpulan/*Conclusion Drawing*

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang diambil pada tahap awal penelitian didukung oleh bukti-bukti kuat, valid dan konsisten saat pengambilan data maka kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono,2009:253).

1.7.7. Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009:273). Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai Impelementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon, maka penulis akan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kualitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara nantinya akan dicek juga dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda, maka penulis akan berdiskusi lebih lanjut dengan informan atau sumber data yang lain,

untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Kelurahan Tlogosari Kulon mengenai Impelementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang proses pemanfaatan ruang terbuka hijau publik. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh penulis. Dalam mengecek keabsahan data, penulis memperhatikan data yang diperoleh dan dibandingkan dengan latar belakang sejarah, sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Peneliti membandingkan data yang diperoleh dengan *me-recheck* berbagai sumber, metode dan teori. Untuk itu peneliti melakukan dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan- perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong,2010:332).

3.3. Faktor-faktor Pendorong Dan Penghambat Tentang Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang.

3.3.1. Komunikasi

Komunikasi berupa koordinasi antar tim teknis sudah dapat berjalan dengan baik karena setiap anggota dalam rapat diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Komunikasi berupa sosialisasi mengenai kebijakan penataan RTH di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon sudah dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengenai pentingnya ruang terbuka hijau yang difungsi untuk kepentingan publik mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan penataan RTH menjadi sangat terbatas sehingga kebijakan penataan RTH tidak dapat berjalan dengan baik.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya RTH, salah satunya adalah memberikan stimulus masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau. Dengan merasakan langsung manfaat ruang terbuka, masyarakat akan sadar mengenai pentingnya RTH.

3.3.2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud adalah diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya sarana prasarana. Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penataan ruang terbuka hijau publik ini dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya, diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya finansial (dana) dan sumberdaya sarana prasarana (fasilitas).

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di kelurahan Tlogosari Kulon memiliki sumber daya sebanyak 8 orang yang terdiri dari PNS dan 812 non PNS yang khusus ditugaskan untuk merawat RTH.

Namun jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki masih sangat terbatas. Namun pemerintah desa Tlogosari Kulon berupaya untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah kota maupun dinas terkait.

Sumberdaya yang lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan

penataan ruang terbuka hijau adalah sumberdaya fasilitas atay sumberdaya sarana dan prasarana. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa fasilitas yang dimiliki kelurahan Tlogosari Kulon sangat terbatas, sehingga kurang maksimal dan kurang sesuai dengan yang dibutuhkan.

3.3.3. Disposisi (Disposition)

Untuk menjaga agar implementasi kebijakan tetap berjalan sesuai dengan yang dengan rumusan kebijakan maka dilakukan survei di lapangan untuk mengetahui apakah penataan ruang terbuka hijau publik yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan daerah atau belum.

Kejujuran dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari adanya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik yang seharusnya diberlakukan sama maupun langkah riil terhadap ketidaksesuaian antara implementasi dengan rumusan kebijakan yang ada. Adanya sanksi berupa teguran sebagai langkah riil untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi diharapkan dapat memberikan dampak positif.

3.3.4. Struktur birokrasi (Beureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

4.1. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon

4.1.1. Ketercukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ruang terbuka hijau diamanatkan dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007, dimana proporsi dalam penataan ruang terbuka hijau untuk wilayah kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota tersebut dan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota.

Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon, memiliki luas sebesar 280,5 Ha, sedangkan luas RTH yang ada sebesar 6% (16,83 Ha) dari luas wilayah kelurahan. Data ini menunjukkan bahwa luas RTH di Kelurahan Tlogosari Kulon masih kecil atau jauh dari RTH minimal yang seharusnya mempunyai luas RTH, yaitu sebesar 56,1 (Ha) atau 20% dari luas wilayah. Oleh karena itu pemerintah Kota Semarang mendorong komponen masyarakat aparaturnya kelurahan Tlogosari Kulon serta kelurahan Tlogosari Kulon untuk memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau. Hal ini diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ruang terbuka hijau, yaitu dengan penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH, penyandang dana dalam pemeliharaan RTH, memberikan masukan atau saran dalam pembangunan RTH, dan lain-lain.

Tidak terpenuhinya ketercukupan lahan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon dikarenakan pesatnya pembangunan di wilayah ini, terutama banyak pembangunan ruko-ruko dan pertokoan serta semakin bertambahnya PKL yang ada di kawasan RTH sehingga mengalihkan fungsi RTH. Banyaknya pemukiman, dan perumahan yang berada di Kelurahan Tlogosari Kulon menyebabkan RTH Publik semakin tidak mendapatkan tempat. Penyebab yang lain

adalah pengelolaan dari RTH Publik itu sendiri, dimana sebenarnya ada 20 taman yang ada di Kelurahan Tlogosari Kulon yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh warga Kelurahan Tlogosari Kulon.

Selain disebabkan alih fungsi lahan, belum terpenuhinya RTH di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon juga dikarenakan belum selesainya proses pembebasan lahan oleh pemerintah kota.

Dari sini peneliti melihat kurangnya ketercukupan ruang terbuka hijau publik diakibatkan Komunikasi dan Sumber Daya yang tidak berjalan dengan baik antar instansi pemerintah.

4.2. Kesesuaian Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4.2.1. Fungsi Utama (Instrinsik)

Fungsi utama atau fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau adalah untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Beberapa fungsi ekologis RTH di kota adalah antara lain sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami, sebagai peneduh, areal resapan air menghasilkan oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah dan berfungsi sebagai penahan angin.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon belum mampu secara maksimal berfungsi sebagai paru-paru kota. Hal ini dikarenakan minimnya pohon-pohon yang besar dan rindang yang diakibatkan adanya penebangan pohon-pohon yang besar dan berumur lama serta dalam proses reboisasi. Penebangan ini dengan tujuan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan di wilayah Tlogosari Kulon.

Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, RTH juga dapat berfungsi sebagai peneduh. Fungsi ini disebabkan karena banyaknya pohon yang ada pada RTH atau taman-taman sehingga menciptakan dan mempertahankan iklim yang sejuk. Namun dari pengamatan yang dilakukan dapat diketahui RTH di wilayah Tlogosari Kulon kurang berfungsi secara optimal sebagai peneduh. Hal ini dikarenakan pohon-pohon yang ada di taman-taman masih pendek dan masih terdapat proses pengembangan RTH dan penataan taman-taman.

Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai produsen oksigen, hal ini karena pohon-pohon yang ada di RTH merupakan penyerap gas karbon dioksida yang cukup penting. Tumbuhan atau pohon yang menyerap cahaya matahari menghasilkan proses fotosintesis yang berfungsi untuk mengubah gas karbon dioksida dengan air menjadi dan oksigen. Selain bermanfaat sebagai produsen oksigen, RTH juga memiliki fungsi sebagai penyerap air. Hal ini karena sistem perakaran tanaman dan banyaknya daun yang jatuh akan berubah menjadi humus dan akan mengurangi tingkat erosi, menurunkan aliran permukaan dan mempertahankan kondisi air tanah di lingkungan sekitarnya. Pada musim hujan laju aliran permukaan dapat dikendalikan oleh penutupan vegetasi yang rapat, sedangkan pada musim kemarau potensi air tanah yang tersedia bisa memberikan manfaat bagi kehidupan di lingkungan perkotaan.

Dari hasil pengamatan dapat diketahui RTH yang berada di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon sudah memenuhi syarat sebagai penyerap air. Namun pada musim hujan, wilayah ini masih sering terjadi banjir. Hal ini bukan dikarenakan air tidak mampu terserap di tanaman, tapi disebabkan oleh faktor lain yakni di wilayah Tlogosari banyak pembangunan peninggian jalan, sehingga kurang memperhatikan saluran air dan air menggenang di jalan dan tidak dapat masuk dalam saluran air.

4.2.2. Fungsi Tambahan (Ekstrinsik)

1. Fungsi Sosial dan Budaya:

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi sosial, artinya bahwa RTH dapat menjadi media berkumpul bagi masyarakat. Salah satu fungsi sosial dan budaya adalah sebagai tempat menggambarkan ekspresi budaya lokal. RTH atau taman dapat menjadi media atau tempat aktivitas seni dan budaya, seperti atraksi-atraksi kesenian oleh masyarakat.

RTH di wilayah Tlogosari Kulon mampu menjadi ruang untuk mengekspresikan potensi seni masyarakat. Selain RTH atau Taman dapat menjadi ruang publik untuk mengadakan acara-acara yang melibatkan masyarakat taman. Hal ini dikarenakan minimnya lahan luas di lingkungan kampung, sehingga masyarakat memanfaatkan taman untuk mengadakan suatu kegiatan.

Selain itu RTH memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai media komunikasi warga, artinya bahwa masyarakat sering memanfaatkan taman atau ruang terbuka untuk berkumpul dan berbincang-bincang. Selain sebagai lokasi untuk berekspresi dan berkomunikasi, ruang terbuka hijau atau taman juga difungsikan sebagai tempat rekreasi dimana masyarakat dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman.

2. Fungsi Ekonomi:

Selain memiliki fungsi sosial, ruang terbuka yang ada di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon juga memiliki fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya ruang terbuka hijau seperti manfaat langsung dari tanaman atau pohon, seperti berupa kayu bakar maupun kayu perkakas. Penanaman jenis tanaman ruang terbuka hijau yang bisa menghasilkan

biji, buah atau bunga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf gizi, kesehatan dan penghasilan masyarakat.

Dari pengamatan yang dilakukan diketahui banyak manfaat langsung yang diperoleh masyarakat dari RTH yang berada di wilayah Tlogosari Kulon. Selain itu digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari, juga dapat dijual. Keberadaan RTH cukup memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

3. Fungsi Estetika

Selain adanya manfaat langsung, ruang terbuka hijau juga memiliki manfaat yang tidak langsung. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga memiliki fungsi lain lain, yakni memiliki nilai estetika, yang antara lain adalah meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

RTH di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon telah memberikan kenyamanan bagi warga sekitar. Namun kenyamanan yang diperoleh masyarakat tidak didukung dengan adanya jaminan keamanan, sehingga akan mengurangi rasa nyaman tersebut.

Wilayah kelurahan Tlogosari Kulon memiliki banyak taman yang memiliki bermacam-macam fungsi dan ukuran. Taman Virgin merupakan salah satu taman yang berada di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon yang berukuran cukup besar yang dikelola oleh Virgin Bakery. Masyarakat sekitar sering memanfaatkan taman sebagai wahana rekreasi. Di sekitar taman tersebut banyak ditemui pedagang makanan dan minuman, bahkan terdapat arena

bermain baik yang sudah menjadi fasilitas taman maupun arena yang khusus didatangkan penyedia arena bermain berbayar. Hal ini menunjukkan bahwa taman sebagai bentuk RTH memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar untuk mencari mata pencaharian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka diperoleh hasil penelitian berkenaan dengan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Tlogosari Kulon, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ruang terbuka hijau yang ada di Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon belum memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007, dimana proporsi dalam penataan ruang terbuka hijau untuk wilayah kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota tersebut dan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Luas lahan RTH di Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon sebesar 16,83 Ha, artinya luas RTH hanya sebesar 6% dari luas wilayah kelurahan.
2. Ruang terbuka hijau yang ada di Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon memenuhi fungsi dan manfaat secara optimal, baik fungsi utama maupun fungsi tambahan. Ruang terbuka hijau di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon belum mampu secara maksimal berfungsi sebagai paru-paru kota.
3. Ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Tlogosari Kulon mampu menjadi ruang untuk mengekspresikan potensi seni masyarakat dan sebagai media komunikasi warga.
4. Ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Tlogosari Kulon mampu memberikan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang diperoleh dari adanya ruang terbuka hijau seperti manfaat langsung dari tanaman atau pohon, seperti berupa

kayu bakar maupun kayu perkakas. Penanaman jenis tanaman ruang terbuka hijau yang bisa menghasilkan biji, buah atau bunga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf gizi, kesehatan dan penghasilan masyarakat.

5. Dalam melaksanakan kebijakan RTH diketahui adanya keterbatasan jumlah personil atau kekurangan jumlah pegawai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon yang pertama adalah:

1. Struktur Birokrasi. Dalam struktur birokrasi aspek yang dilihat adalah antara lain tentang tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi secara jelas yang tercantum dalam keputusan walikota, tetapi di Kelurahan Tlogosari Kulon belum mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga tidak dapat berbuat banyak dalam proses implementasi program ini. Kemudian mengenai standar operasional prosedur dimana baik pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang maupun pihak Kelurahan Tlogosari Kulon belum memiliki SOP yang baku dalam melaksanakan implementasi program ini, para implementor hanya mengacu pada perda atau kebijakan terkait. Koordinasi dan fragmentasi implementor masih kurang terutama koordinasi dengan pihak Kelurahan Tlogosari Kulon sehingga tidak bisa optimal dalam membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Kemudian dalam hal pendelegasian wewenang, implementor menggunakan pendelegasian secara tidak resmi dan hanya lewat koordinasi saja. Akibatnya ada beberapa implementor yang bingung dan menjadi bekerja tidak tepat waktu.

2. Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi program penataan RTH Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon adalah komunikasi. Implementor kurang efektif dalam memberikan seminar dikarenakan hanya mengikut sertakan perangkat kelurahan saja. Kejelasan informasi dinilai cukup karena masyarakat mengetahui tentang RTH Publik dan sebagian masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon sudah ada yang ikut serta membangun taman yang dikelola mereka sendiri.
3. Faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi program penataan RTH Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon adalah sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi kemampuan, kapasitas dan kompetensi implementor, dalam implementasi program ini sebagian besar pegawai memiliki kompetensi yang cukup baik terkait dengan pelaksanaan program, ada sebagian kecil yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikannya tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan baik. Kemudian berhubungan dengan jumlah personil, implementor masih kekurangan personil dalam implementasi program penataan RTH Publik ini, hal tersebut berdampak terhadap sulitnya pengendalian atau pengelolaan RTH Publik di masa yang akan datang. Kemudian belum ada informasi mengenai tata cara pelaksanaan secara resmi dari instansi vertikal di atasnya. Sumber daya keuangan untuk implementasi program ini berasal dari APBD dan masih kurang, pihak Kelurahan belum memiliki anggaran untuk program ini sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk ikut serta dalam pengelolaan RTH Publik. Kurangnya dana dalam implementasi program ini berpengaruh pada pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan, fasilitas diberikan secara bertahap, tapi kualitasnya baik. Kemudian wewenang yang dimiliki petugas didapat dari

tupoksi serta wewenang dalam melaksanakan yang sesuai dengan tupoksi dan menolak kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi.

4. Faktor yang terakhir adalah kecenderungan – kecenderungan implementor dalam melaksanakan implementasi program ini. Kecenderungan – kecenderungan bisa dilihat dari komitmen implementor. Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sudah bagus dengan terus berusaha dan tidak berhenti dalam mengembangkan RTH Publik sebelum target terpenuhi. Tingkat penerimaan dari implementor juga baik, mereka semua menyetujui adanya program ini dan berharap akan terus berlanjut sampai tujuan benar-benar terpenuhi. Intensitas pelaksanaan dan loyalitas implementor sudah sesuai dengan kebutuhan dan implementor mau terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan rutin. Kepuasan kerja dari implementor belum maksimal dikarenakan target mereka masih jauh belum terpenuhi, mereka masih kurang maksimal dalam melakukan pengelolaan RTH Publik di Kelurahan Tlogosari Kulon. Keterlibatan implementor dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sudah sesuai dengan tupoksi, keterlibatan implementor didapatkan dari tupoksi tersebut, jadi jika mereka sudah mendapat tugas secara otomatis mereka terlibat dalam implementasi program ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Tlogosari Kulon, berikut ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Tlogosari Kulon akan menjadi

lebih baik lagi pada masa mendatang, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi dalam pemenuhan target ruang terbuka hijau publik, selalu gencar melakukan sosialisasi mengenai peningkatan jumlah lahan untuk ruang terbuka hijau. Hal yang perlu dilakukan adanya dengan melakukan kampanye-kampanye mengenai penting ruang terbuka hijau untuk pelestarian ekosistem.
2. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai penataan lingkungan dan penataan ruang terbuka hijau yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal.
3. Pemerintah Kota diharapkan dapat menggerakkan dinas terkait maupun wilayah kecamatan dan kelurahan yang menjadi bawahannya untuk dapat menerapkan tata kelola lingkungan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budihardjo, Eko, DjokoSujarto. 2009. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: PT. Alumni
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: BumiAksara
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara
- Joga, Nirwono, IwanIsmaun. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit APII Bandung
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke*

Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : BumiAksara

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo